

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Uang merupakan komponen yang integral dalam dinamika ekonomi masyarakat. Konsep uang dapat diuraikan dalam dua pengertian, yaitu menurut hukum dan menurut fungsinya. Menurut hukum, uang merujuk pada sesuatu yang diakui oleh undang-undang sebagai alat pembayaran resmi. Sementara menurut fungsinya, uang adalah medium yang secara luas diterima dalam berbagai transaksi perdagangan dan pembayaran utang (Genady 2018, 1–114).

Perkembangan teknologi *digital* saat ini menunjukkan gerakan yang lebih cepat dan luas daripada yang diharapkan atau dibayangkan. Menurut Shofawati (2019, 389) ketersediaan keuangan *digital* dianggap sebagai faktor yang dapat memperluas inklusi keuangan dengan memudahkan akses terhadap sumber pembiayaan dan investasi, yang pada gilirannya mendukung perluasan operasional UMKM. Dalam konteks industri perbankan, teknologi *digital* menjadi perubahan penting yang harus diadopsi dan dipahami oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk melayani nasabah dengan baik. Meskipun teknologi terus berkembang pesat, hal ini tidak menghentikan manusia untuk mengembangkan sistem pembayaran yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi juga memberikan dampak signifikan pada sektor perdagangan, terutama dalam hal penjualan *online* atau *e-commerce* yang semakin berkembang pesat. *E-commerce* memungkinkan pelaku bisnis

untuk beroperasi secara *online* dan memberikan konsumen akses informasi untuk membuat keputusan pembelian (Panjaitan 2014, 22–31).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221.563.479 orang dari total populasi sebesar 278.696.200 pada tahun sebelumnya. Tingkat penetrasi internet di Indonesia pada tahun tersebut mencapai 79,5%, meningkat 1,4% dibanding periode sebelumnya. Dari tahun 2018 hingga 2023, penetrasi internet di Indonesia telah meningkat dari 64,8% menjadi 78,19%. Berdasarkan *gender*, lebih dari setengahnya berasal dari laki-laki (50,7%) dan perempuan (49,1%). Dari segi usia, mayoritas pengguna internet adalah gen X (kelahiran 1965-1980) sebanyak 18,98%, post gen Z (kelahiran kurang dari 2023) sebanyak 9,17%, *baby boomers* (kelahiran 1946-1964) sebanyak 6,58% dan *pre boomer* (kelahiran 1945) sebanyak 0,24% (A. P. J. I. Indonesia, 2024).

Untuk mendukung pertumbuhan *e-commerce*, diperlukan sistem pembayaran berbasis internet yang menggantikan metode manual atau tradisional menjadi pembayaran *online*. Seiring dengan tren saat ini, beberapa platform perdagangan telah mengadopsi pembayaran berbasis QR *code* sebagai alternatif. Hal ini mengubah perilaku masyarakat dari pembayaran tunai menjadi non-tunai, meskipun tidak semua orang memiliki pemahaman tentang sistem tersebut. Penggunaan pembayaran elektronik memerlukan pemahaman tentang teknologi. Penggunaan QR *code* dalam sistem pembayaran dianggap efisien dalam berbagai aspek (Manurung & Lestari

2020, 911–930) . *Cashless* mengacu pada transaksi masyarakat yang tidak lagi menggunakan uang fisik, tetapi melalui transfer informasi keuangan secara *digital*. Dalam transaksi sehari-hari, masyarakat tidak mengandalkan uang tunai, melainkan menggunakan uang *digital* (Rivani dan Rio 2021, 75–89).

Salah satu layanan pembayaran yang tengah populer di masyarakat adalah menggunakan pemindai QR *code*. QR *code* adalah serangkaian kode yang mengandung informasi seperti identitas pedagang/pengguna, jumlah pembayaran, dan mata uang, yang dapat diakses melalui perangkat khusus untuk melakukan transaksi. QR *code* memungkinkan penyimpanan informasi dalam bentuk kode, seperti pola titik-titik hitam. Awalnya, aplikasi khusus diperlukan untuk membaca QR *code*, tetapi dengan kemajuan teknologi, kini kita bisa membaca QR *code* langsung melalui *kamera* ponsel. QR *code* digunakan dalam berbagai konteks, termasuk sebagai alternatif metode pembayaran. Di Indonesia, perkembangan sistem pembayaran berbasis QR *code* awalnya melibatkan berbagai jenis QR *code*. Untuk mengatasi keragaman ini, Bank Indonesia memperkenalkan standar QR *code* yang disebut QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), yang memungkinkan kode QR dari berbagai penerbit dapat dibaca oleh penerbit lainnya (B. Indonesia, 2019).

QRIS diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada 17 Agustus 2019, tetapi mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2020. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan semua transaksi di berbagai sektor. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) adalah sebuah QR *code* yang dikeluarkan oleh

Bank Indonesia dan telah disesuaikan dengan standar sehingga dapat digunakan oleh semua aplikasi pembayaran berbasis QR code, seperti OVO, GoPay, LinkAja, Dana, dan lainnya. Aplikasi QRIS disediakan oleh pedagang atau penjual, sementara konsumen dapat menggunakan dompet *digital*, layanan perbankan seluler, atau uang elektronik berbasis QR. Dalam implementasinya, transaksi dengan kartu ATM menggunakan GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) Bank Indonesia, sedangkan untuk transaksi dengan QR code, Bank Indonesia menggunakan QRIS. QRIS dapat digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari pedagang kecil hingga *merchant* di *mall*, karena kode QRIS dapat dicetak menggunakan kertas biasa tanpa perlu mesin *Electronic Data Capture* (EDC). QRIS bukanlah aplikasi pembayaran baru atau instrumen pembayaran, tetapi berfungsi sebagai antarmuka yang memfasilitasi transaksi.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, dalam penyampaian di Jakarta yang dikutip dari *website infobanknews* (Ibrahim, 2024) mengungkapkan bahwa transaksi keuangan *digital* di Tanah Air mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam satu tahun terakhir. Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah transaksi dan penggunaan QRIS. Saat ini, transaksi menggunakan QRIS sudah mencapai 45 juta orang pada awal 2024. Perry menyebutkan bahwa setidaknya 41 juta pengguna QRIS tersebut merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang melakukan transaksi dengan cepat. Kemudahan dan beragam fitur yang ditawarkan oleh QRIS mendukung inklusi ekonomi dan keuangan *digital* serta konektivitas

pembayaran antarnegara. QRIS telah diimplementasikan di Thailand dan Malaysia. Untuk masa depan, Perry mengungkapkan bahwa QRIS juga akan mulai digunakan di China, India, dan Jepang.

Saat ini dengan QRIS, seluruh aplikasi pembayaran dari penyelenggara manapun baik bank dan nonbank yang digunakan masyarakat, dapat digunakan di seluruh toko, pedagang, warung, parkir, tiket wisata, donasi (*merchant*) berlogo QRIS, meskipun penyedia QRIS di *merchant* berbeda dengan penyedia aplikasi yang digunakan masyarakat. *Merchant* hanya perlu membuka rekening atau akun pada salah satu penyelenggara QRIS yang sudah berizin dari BI. Selanjutnya, *merchant* sudah dapat menerima pembayaran dari masyarakat menggunakan QR *code* dari aplikasi manapun penyelenggaranya (B. Indonesia, 2019)

Jumlah penduduk NTT yang menggunakan QRIS meningkat pesat karena QRIS merupakan Sistem pembayaran yang Cepat, Mudah, Murah, Aman, Handal. Saat ini, pada tahun 2024, jumlah UMKM yang mengadopsi sistem pembayaran QRIS di NTT telah mencapai 231.732, dengan sebanyak 74.094 UMKM di kota Kupang dan 26 UMKM di Kecamatan Kota Raja. Bank Indonesia, dari sisi supply, mendorong pertumbuhan pedagang yang menggunakan QRIS (disebut sebagai *merchant*) melalui program pasar SIAP QRIS. Selama tahun 2022, sejumlah pasar seperti Oeba, Kasih Naikoten, Baru Atambua, Boubou, dan Nataga diluncurkan sebagai pasar SIAP QRIS. Tambahan lagi, pusat perbelanjaan Transmart Kupang juga dijadikan pusat perbelanjaan SIAP QRIS. Pada akhir tahun 2022, jumlah pedagang QRIS

mencapai 141.727. Di antara Januari hingga Oktober 2022, Provinsi NTT mencatat 952.073 transaksi QRIS dengan total nominal Rp. 129,83 miliar, dengan sebagian besar transaksi terjadi di Kota Kupang.

Selain digunakan dalam kegiatan perdagangan, merchant QRIS juga memanfaatkan QRIS dalam berbagai skema lainnya, seperti transaksi pemerintah daerah, pembayaran parkir, dan sumbangan sosial di rumah ibadah. Pemerintah daerah di NTT menyediakan fasilitas pembayaran untuk pajak, seperti Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2), pajak kendaraan bermotor di Samsat, serta retribusi pasar. Langkah ini diambil sebagai salah satu upaya untuk mendorong peningkatan Pendapatan Ekonomi Daerah (Tani, A. 2023).

Keunggulan QRIS bagi UMKM terletak pada fitur-fitur yang meningkatkan aksesibilitas, keamanan, dan efisiensi. QRIS menyediakan akses mudah dan universal bagi UMKM melalui satu QR code, memungkinkan mereka menerima pembayaran dari berbagai e-wallet dan layanan perbankan mobile. Ini tidak hanya memudahkan proses pembayaran bagi pelanggan, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan kepuasan mereka. QRIS juga dianggap sebagai alat pembayaran alternatif yang lebih higienis karena dapat mengurangi kontak fisik, mudah digunakan, dan memfasilitasi pembayaran. QRIS memiliki bentuk sederhana dan hanya memerlukan penempatan QR code di depan meja kasir, serta dipahami sebagai bentuk kode batang digital yang mempermudah pencatatan dan pembayaran transaksi digital.

QRIS menawarkan manfaat yang signifikan dengan mengurangi kebutuhan akan sistem pembayaran yang kompleks dan mahal, memungkinkan UMKM menghemat waktu dan sumber daya yang dapat dialokasikan ke area lain bisnis mereka. QRIS juga mengurangi beban administratif, memungkinkan UMKM fokus pada pertumbuhan dan pengembangan bisnis. QRIS memainkan peran penting dalam transformasi digital UMKM, membuka jalan bagi peningkatan efisiensi, keamanan, dan pertumbuhan bisnis. Dengan mengadopsi teknologi ini, UMKM dapat mengotomatisasi aspek pembayaran bisnis mereka, mengurangi kebutuhan proses manual yang memakan waktu dan sumber daya, serta memudahkan manajemen keuangan dengan menyederhanakan proses pelacakan pendapatan dan pengeluaran, serta memfasilitasi rekonsiliasi keuangan.

Bank Indonesia menetapkan aturan baru mengenai potongan QRIS bagi pelaku UMKM yang menggunakan layanannya. Ketentuan ini telah diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2023 untuk seluruh bank, termasuk Bank BCA. Kebijakan tersebut diambil setelah melalui berbagai kajian. Menurut informasi dari Instagram resmi Bank Indonesia, adanya penyesuaian tarif potongan QRIS diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan dan keberlanjutan QRIS. Dengan begitu, masyarakat bisa terus menggunakan QRIS dalam setiap transaksi.

Menurut aturan terbaru *Merchant Discount Rate* (MDR) dari Bank Indonesia, tarif potongan untuk QRIS telah meningkat menjadi 0,3% dari sebelumnya yang gratis selama masa pandemi COVID-19, dengan

mempertimbangkan situasi ekonomi Indonesia pada saat itu. Tarif 0,3% berlaku bagi Usaha Mikro yang melakukan transaksi di atas Rp. 100.000, sedangkan untuk transaksi di bawah Rp. 100.000, biaya layanan QRIS tersebut dibebaskan oleh Bank Indonesia. Bagi pelaku UMKM, ketika mereka menerima pemasukan sebesar Rp. 200.000 dari satu transaksi, mereka akan dikenai biaya sebesar 0,3% dari jumlah total transaksi, yang setara dengan Rp. 600. Akibatnya, jumlah total pemasukan yang diterima oleh pelaku UMKM menjadi Rp. 199.400 setelah dikurangi biaya tersebut. Ini merupakan sebuah tantangan bagi pelaku UMKM karena meskipun mereka memperoleh berbagai keuntungan, namun terdapat beberapa kelemahan, seperti adanya biaya tarif potongan sebesar 0,3%.

Akan tetapi, biaya potongan tersebut tidak dibebankan kepada pelanggan di UMKM tersebut, tetapi kepada pelaku UMKM yang memanfaatkan layanan pembayaran QRIS. Fenomena yang disebutkan di atas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Azhari, 2021, 63-70). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mayoritas pelaku UMKM di kota Pematangsiantar mengetahui QRIS sebagai alat pembayaran digital yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. QRIS memberikan keunggulan dibandingkan dengan sistem pembayaran digital lainnya. Selain itu, adopsi QRIS membantu UMKM dalam melakukan pembayaran secara lebih praktis, cepat, dan aman, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan mereka melalui peningkatan transaksi. Namun, kendala yang dihadapi adalah jaringan internet yang kurang stabil saat melakukan transaksi, yang menjadi hambatan



bagi pelaku UMKM dan konsumen. Selain itu, biaya Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0,07% yang diberlakukan kepada pedagang juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM di Pematangsiantar.

Dalam konteks penyediaan layanan pembayaran digital, UMKM juga dapat mempertimbangkan QRIS sebagai pilihan. Dengan QRIS, pembayaran menjadi lebih mudah, efisien, dan memberikan dampak positif pada peningkatan pendapatan usaha yang diterima oleh UMKM setelah menggunakan QRIS. Studi oleh (Carera, *et al.*,2023) menegaskan bahwa terdapat perbedaan omset penjualan yang signifikan sebelum dan sesudah menggunakan QRIS. Hasil penelitian sebelumnya oleh (Hutagalung *et al.*, 2021, 94–103) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan QRIS memberikan dampak positif terhadap keberhasilan UMKM di Pematangsiantar.

Studi yang dilakukan oleh Saputri (2020, 1–11) menemukan bahwa persepsi memiliki pengaruh terhadap preferensi konsumen dalam menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran *digital*. Faktor persepsi kemanfaatan terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat penggunaan QRIS, seperti yang ditemukan oleh analisis individual. Temuan ini didukung oleh hasil *odd ratio* yang menunjukkan bahwa peluang persepsi kemanfaatan mempengaruhi minat konsumen dalam menggunakan QRIS sebesar 99,549 kali.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Mahyuni & Setiawan (2021, 735–747) juga menemukan bahwa UMKM memiliki persepsi positif terhadap QRIS sebagai alternatif pembayaran yang mudah dan dapat mengurangi

kontak fisik. Intensi penggunaan QRIS oleh UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk persepsi positif terhadap QRIS dan pengaruh dari pihak luar seperti pembeli, teman dekat, dan *influencer*. Namun, masih terdapat hambatan dalam penggunaan QRIS seperti kualitas koneksi internet, biaya penggunaan, dan batas transaksi.

Studi yang dilakukan oleh Subarno *et al.*, (2021, 43–57) menunjukkan bahwa *merchant* yang menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standard* (QRIS) di Surakarta selama tahun 2020 meningkat. Akan tetapi edukasi para pedagang tentang pemakaian QRIS masih kurang. Masih banyak pedagang yang belum mengerti cara penggunaan QRIS, mempunyai lebih dari satu stiker QRIS, dan penempelan stiker QRIS yang disandingkan dengan stiker kode QR dari aplikasi pembayaran lain.

Penelitian Mayanti (2022, 65–72) membahas Preferensi Masyarakat terhadap QRIS sebagai solusi pembayaran *digital*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa QRIS diterima secara positif oleh masyarakat sebagai teknologi pembayaran non-tunai. Penggunaan QRIS diyakini memiliki dampak positif di masa depan karena masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan QRIS.

Indriani *et al.*, (2023, 911–930) membahas penerapan QRIS, penjualan, dan kepuasan pelanggan di Alfamart Talaga Wetan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan QRIS di Alfamart memiliki dampak positif terhadap penjualan dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Penerapan QRIS di Alfamart berdampak pada laba penjualan Alfamart

terbukti dari laporan BAP pada 3 bulan terakhir yakni bulan Mei, Juni dan Juli 2022. Penggunaan metode pembayaran dengan kode QR menyumbang 23-24%. Penggunaan QRIS di Alfamart juga memberikan efek terhadap kepuasan pelanggan Alfamart Talaga Wetan dilihat dari jawaban 8 narasumber yang menyatakan puas mengenai manfaat adanya QRIS di Alfamart.

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat permasalahan dengan judul “Penggunaan Sistem Pembayaran *Quick Response Indonesian Standard (QRIS)* Dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kota Kupang (Studi Kasus Pada UMKM Di Kecamatan Kota Raja)”. Alasan penulis tertarik dengan judul tersebut adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis dampak penggunaan sistem pembayaran QRIS terhadap pendapatan UMKM. Meskipun diketahui bahwa pelaku UMKM mendapatkan berbagai keuntungan dari QRIS, namun di sisi lain, mereka juga dikenakan biaya potongan dari setiap transaksi pembelian pelanggan di UMKM mereka.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana respon UMKM di Kecamatan Kota Raja dalam mengimplementasi QRIS?
2. Bagaimana implementasi penggunaan sistem pembayaran QRIS mempengaruhi pendapatan UMKM dalam transaksi pembayaran?

3. Apa faktor-faktor yang menjadi kendala dari sistem pembayaran QRIS?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menilai respon dan tingkat adopsi UMKM di Kecamatan Kota Raja terhadap implementasi QRIS dalam sistem pembayaran mereka.
2. Mengidentifikasi dampak implementasi QRIS terhadap pendapatan UMKM dalam transaksi pembayaran di pasar lokal.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam implementasi dan penggunaan sistem pembayaran QRIS oleh UMKM di kota Kupang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi  
Sebagai referensi mencari literatur yang terkait dengan sistem pembayaran yang optimal dan produktif dengan menggunakan teknologi QRIS.
2. Bagi UMKM  
Sebagai panduan bagi pelaku UMKM dalam mendukung implementasi sistem pembayaran yang cepat, mudah, murah, aman dan handal.
3. Bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur  
Memberikan kontribusi pemikiran dan menilai keefektifan penggunaan pembayaran QRIS dalam meningkatkan inklusi keuangan.